



Kesiapan Daerah dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)



Dialog Rektor dengan DPRD Kota Cirebon
Savero Hotel-Depok, 19 Maret 2018



**Dialog Rektor dengan DPRD Kota Cirebon
Savero Hotel-Depok, 19 Maret 2018**



Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta.

Selama 30 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan *Wibawa Seroja Nugraha*.

Sejak 2015 ia dipercaya menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI), dan sejak 2016 ia menduduki posisi sebagai salah satu Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI).

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com, HP 0812-9322-202, web <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>



Materi

- Komitmen Indonesia dalam Pelaksanaan SDGs
- TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs
- Tujuan SDGs
- Strategi Pelaksanaan TPB/SDGs
- Prinsip dan Partisipasi Para Pihak
- Pemetaan Goal, Target & Indikator
- Pembangunan Daerah dan Pencapaian TPB/SDGs
- Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
- Rencana Pelaksanaan TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat
- Tantangan Pelaksanaan



Komitmen Indonesia dalam Pelaksanaan SDGs

SDGs adalah:

- Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan,
- Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,
- Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta
- Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.



Komitmen:

1. Indonesia berkomitmen melaksanakan TPB/SDGs untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan;
2. Komitmen tersebut diwujudkan dengan Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB;
3. TPB/SDGs sejalan dengan Nawacita yang diterjemahkan ke dalam RPJMN 2015-2019;
4. Presiden akan terus memantau pelaksanaan TPB/SDGs mengingat pencapaian TPB/SDGs sekaligus menjadi tolok ukur tercapainya agenda pembangunan nasional.

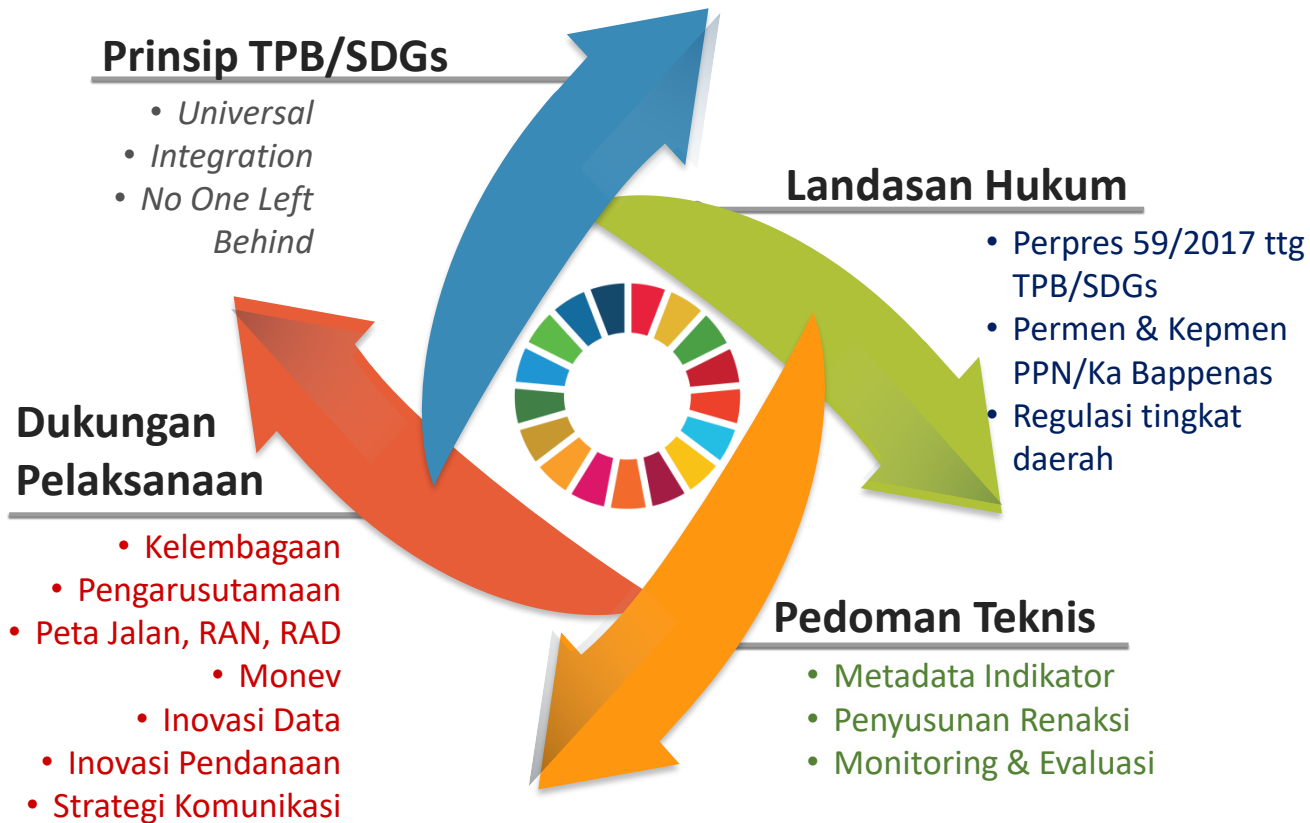
TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs



Tujuan SDGs



Strategi Pelaksanaan TPB/SDGs



Prinsip dan Partisipasi Para Pihak

Prinsip Kemitraan



Trust Building



Equal Partnership



Participation



Accountable



Mutual Benefits

Platform Partisipasi TPB/SDGs

P

1. Penetapan Indikator dalam Setiap Target/Sasaran
2. Pengembangan Kebijakan, Regulasi, & Penyelarasan Program /Kegiatan
3. Penyiapan Data dan Informasi yang Digunakan
4. Sosialisasi/Diseminasi, Komunikasi & Advokasi
5. Monev & Pelaporan
6. Pendanaan

F

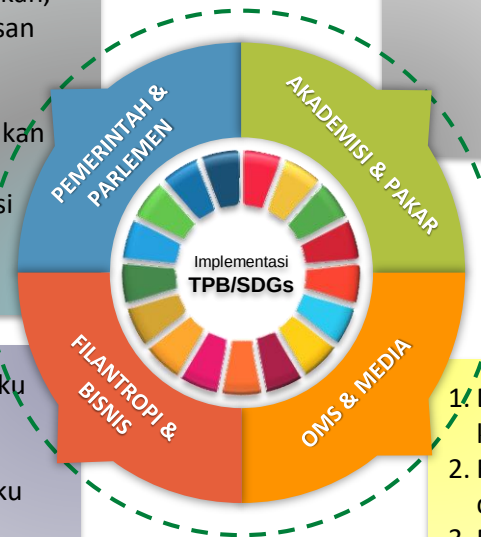
1. Advokasi kepada Pelaku Usaha
2. Fasilitasi Program/ Kegiatan kepada Pelaku Usaha
3. Peningkatan Kapasitas
4. Dukungan Pendanaan

A

1. Peningkatan Kapasitas
2. Pemantauan dan Evaluasi
3. Policy Research

O

1. Diseminasi dan Advokasi kepada Masyarakat
2. Fasilitasi Program/Kegiatan di Lapangan
3. Membangun pemahaman publik
4. Monitoring Pelaksanaan



Pemetaan Goal, Target & Indikator



Pembangunan Daerah dan Pencapaian TPB/SDGs

- ❑ *Pemda merupakan pelaksana dalam pencapaian SDGs.*
- ❑ *SDGs sebagai bagian dari prioritas nasional dan komitmen Internasional harus terintegrasi ke dalam pembangunan daerah*
- ❑ *Tahapan dan proses pencapaian SDGs di daerah merupakan bagian dari tahapan dan proses pembangunan daerah itu sendiri*



Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (1)

Tugas Daerah (Pasal 15) :

- a. Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB 5 (lima) tahunan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (2)

Batas Waktu Penyelesaian Dokumen TPB (Pasal 20):

- a. Peta Jalan TPB tahun 2017-2030 paling lama ditetapkan 12 bulan setelah Perpres TPB berlaku (10 Juli 2018)
- b. RAN TPB tahun 2017-2019 paling lama ditetapkan 6 bulan setelah Perpres TPB berlaku (10 Januari 2018)
- c. RAD TPB tahun 2017-2019 paling lama 12 bulan setelah Perpres TPB berlaku (10 Juli 2018)**

Rencana Pelaksanaan TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat

2017

Membangun pemahaman publik akan pentingnya SDGs dan relevansi keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan dan pencapaiannya

1



MEMBANGUN KELEMBAGAAN

2017 - 2018

- RAD SDGs
- Integrasi agenda SDGs ke dalam agenda pembangunan daerah

2



PENGARUSUTAMAAN SDGs

2018 - 2023

Merealisasikan komitmen semua pemangku kepentingan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kapasitas, peran dan sumber daya yang dimiliki

3

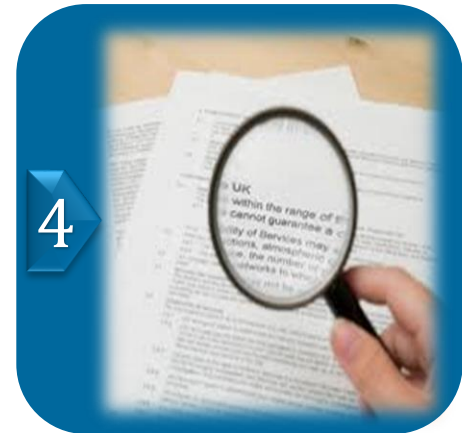


PELAKSANAAN

2018 - 2023

Monitoring dan evaluasi perkembangan dan hasil berbasis data

4



MONITORING

Tantangan Pelaksanaan

1. Memastikan penerapan prinsip inklusif dan “*no one left behind*”
2. Menyusun database yang komprehensif, terpilah dan terintegrasi
3. Mengintegrasikan program seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah
4. Menyelaraskan Rencana Aksi ke dalam agenda pembangunan
5. Menyelaraskan prioritas pemerintah dengan non-pemerintah



SELAMAT DATANG DI KOTA CIREBON

Lampiran: 17 Tujuan SDG's



TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN

Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun



INDONESIA

DAERAH TERMISKIN DI INDONESIA

Tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu



**NTT, Papua,
& Papua Barat**

(sumber: Susenas 2016)

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN



Indeks kedalaman kemiskinan menurun dari 3,43 (2006) menjadi 1,94 (2016) mengindikasikan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil

(sumber: Susenas)

PERLINDUNGAN SOSIAL

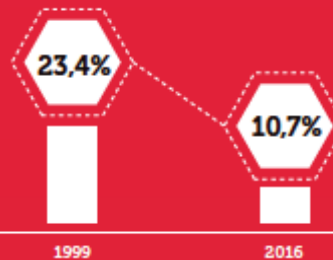


Cakupan JKN melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) meningkat dari 113,4 juta penduduk (2014) menjadi 171,9 juta penduduk (2016)

(Sumber: BPJS Kesehatan)

Pada periode 1999-2016, persentase orang miskin menurun lebih dari setengahnya yaitu dari 23,4% menjadi 10,7%

(Sumber: Susenas)



tetapi



27,76 juta

penduduk Indonesia

masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional

(sumber: Susenas 2016)



TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN

Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan



LEMBAR FAKTA SDGs



INDONESIA

Pada periode 2007-2013, prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) meningkat dari **18,4%** menjadi **19,6%**

(Sumber: Riskesdas)

18,4%

5,4%
gizi buruk

13%
gizi kurang

2007

19,6%

5,7%
gizi buruk

13,9%
gizi kurang

2013



Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita meningkat dari 35,6% (2010) menjadi 37,2% (2013)

(Sumber: Riskesdas)



Prevalensi balita kurus (*wasting*) menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 13,6% (2007) menjadi 12,1% (2013)

(Sumber: Riskesdas)



Prevalensi obesitas pada penduduk di atas 18 tahun meningkat dari 10,3% (2007) menjadi 15,4% (2013)

(Sumber: Riskesdas)



Padi merupakan komoditas dengan tingkat produksi nasional tertinggi dari tahun 2012 -2015

(Sumber: BPS)



Pada 2013, cakupan ASI Eksklusif pada bayi usia enam bulan meningkat menjadi 30,2% dari 15,3% pada tahun 2010

(Sumber: Riskesdas)



TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia



LEMBAR FAKTA SDGs



INDONESIA



Pada periode 1991-2015, Angka Kematian Ibu (AKI) menurun dari 390 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup

(Sumber: SDKI 1991, SUPAS 2015)



Pada periode 1991-2015, Angka Kematian Bayi (AKB) turun dari 68 per 1000 kelahiran hidup menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup

(Sumber: SDKI 1991, SUPAS 2015)

Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi meningkat menjadi 80,7% (2016) dari 71,2% (2013)

(Sumber: Kementerian Kesehatan)



Prevalensi tuberkulosis menurun dari 297 per 100.000 penduduk (2013) menjadi 257 per 100.000 penduduk (2015) (metode mikroskopis)

(Sumber: Kementerian Kesehatan)



Pada tahun 2013, prevalensi hipertensi adalah sebesar 25,8% (hampir 40 juta penduduk di atas 18 tahun) dan diabetes melitus (DM) adalah sebesar 6,9%

(Sumber: Riskesdas)



Total Fertility Rate (TFR) terus mengalami penurunan sejak 1991, namun stagnan pada 2007-2012

(Sumber: SDKI)



Unmet need pelayanan kesehatan terus menurun dari 9,9% (2006) menjadi 4,3% (2016)

(Sumber: Susenas)



Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas terus meningkat dari 75,5% (2014) menjadi 79,4% (2015) dan 81,57% (2016)

(Sumber: Sirkernas)



TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua



LEMBAR FAKTA SDGs



INDONESIA



Pada tahun 2016, Angka Partisipasi Kasar (APK):

1. SD/MI/ sederajat = 109,31%
2. SMP/MTs/ sederajat = 90,12%
3. SMA/SMK/MA/ sederajat = 80,89%

(Sumber: Susenas)



Pada tahun 2015, 35,28% anak usia 3-6 tahun mengenyam pendidikan usia dini

(Sumber: Susenas)



Pada tahun 2015, rata-rata lama bersekolah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah 8,32 tahun

(Sumber: Susenas)



Pada tahun 2015, 99,7% populasi berusia 15-24 tahun sudah melek huruf
(Sumber: Susenas)



Pada tahun 2015, 51,83% remaja usia 15-24 tahun memiliki keterampilan teknologi informasi dan komputer
(Sumber: Susenas)

Persentase guru yang bersertifikat pendidik tahun 2016:



TK: 35,99%



SD: 47,52%



SMP: 49,98%



SMA: 50,53%



SMK: 38,39%



PLB: 45,81%

(Sumber: DAPODIK Tahun Ajaran 2016/2017 Semester 1)



TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER

Mencapai kesetaraan
gender dan
memberdayakan kaum
perempuan



LEMBAR FAKTA SDGs



INDONESIA



Pada tahun 2014, proporsi perempuan di lembaga legislatif tingkat pusat sebesar 17,32%

(Sumber: BPS)



Persentase pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern sebesar 98,9% pada perempuan kawin umur 15-49 tahun dan 97,2% pada laki-laki kawin umur 15-54 tahun

(Sumber: SDG 2012)



Kekerasan terhadap perempuan

Sekitar 2 dari 5 (41,7 %) perempuan umur 15-64 tahun mengalami sedikitnya 1 dari 4 jenis kekerasan (fisik, seksual, emosional, ekonomi) selama hidupnya

Sekitar 1 dari 3 perempuan (15-64 tahun) pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya;

Persentase kekerasan terhadap perempuan di perkotaan lebih tinggi (sebesar 36,3%) dibandingkan perempuan di perdesaan (sebesar 29,8%)

(Sumber: SPHPN 2016)



Usia nikah

Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama:

- a. sebelum umur 18 tahun = 22,4%
- b. sebelum umur 15 tahun = 1,1%

(Sumber: Susenas 2016)



Pada tahun 2012, median umur kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun yaitu 20,1 tahun

(Sumber: SDG)



TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua



LEMBAR FAKTA SDGs



INDONESIA

Pada tahun 2015, sekitar 70,97% rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses air minum layak



Perkotaan
81,30%



Perdesaan
60,58%

(sumber: BPS)

Pada tahun 2015, sekitar 62,14% rumah tangga di Indonesia memiliki sanitasi layak



Perkotaan
76,36%



Perdesaan
47,84%

(sumber: BPS)



Pada tahun 2013, sekitar 65,83% penduduk Indonesia mencuci tangan dengan air bersih dan sabun setelah buang air besar/kecil

(sumber: Statistik Kesehatan 2013)

Periode tahun 2011-2015
telah dibangun:



244 unit
dam pengendali;

1.372 unit
dam pengendali jurang;



3.988 unit
dam penahan;

8.781 unit
sumur resapan;



556 unit
embung air

(sumber: Statistik KLHK 2015)



TUJUAN7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua



LEMBAR FAKTA SDGs



INDONESIA

Konsumsi Listrik

per kapita

pencapaian 2016:

956,4 kWh

(sumber: Kementerian ESDM)

Pada tahun 2016



Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga sebanyak

323.863 SR

(sumber: Kementerian ESDM)

Pada tahun 2016,



Rasio
Elektrifikasi
di Indonesia
mencapai
91,16%

artinya

8,84%
masyarakat
Indonesia
belum
menikmati
listrik

(sumber: Kementerian ESDM)

Bauran energi terbarukan
di Indonesia 2016:

7%



(sumber: Kementerian ESDM)



TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua



LEMBAR FAKTA SDGs



INDONESIA

43 juta kaum muda



38%



62%

TINGKAT PENGANGGURAN NASIONAL
5,61%

KAUM MUDA
19,54%



Pada tahun 2016:

Dari 43 juta penduduk usia muda (15-24 tahun), sebanyak 25% tidak dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan (NEET)

Dari total NEET tersebut, proporsi laki-laki (38%) dan perempuan (62%)

Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional: 5,61%

Tingkat Pengangguran Terbuka Kaum Muda (15-24 tahun): 19,54%

(Sumber: Sakernas)

Pada tahun 2016:



42,4%

Penduduk bekerja di sektor formal



57,6%

Penduduk bekerja di sektor informal

Mayoritas pekerja informal (49%) bekerja di sektor pertanian.



65,45%

Laki-laki



34,55%

Perempuan

Sektor formal masih didominasi oleh pekerja laki-laki

(Sumber: Sakernas)



Pada 2016,

Pertumbuhan PDB riil

5,02%

PDB per Kapita (USD)

3.605

(Sumber: BPS)



Tahun 2016, Pekerja difabel memiliki rata-rata upah yang lebih rendah dari pekerja non difabel dengan pengalaman kerja yang sama, kecuali pada tingkat keahlian tinggi

(Sumber: BPS)

Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit : 18,22% (Sumber: BI)

Tahun 2016, Pekerja laki-laki memiliki rata-rata upah yang lebih tinggi dari pekerja perempuan (Sumber: BPS)

Perbandingan Upah Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin, Keahlian, dan Pengalaman Kerja Maks.1 Tahun



(Sumber: BPS)

Pariwisata dan Ekonomi tahun 2016

Jumlah devisa sektor pariwisata pada tahun 2016:

USD 12,2 Miliar

Jumlah wisatawan manca negara

11,52 juta orang



133,31 juta orang



Jumlah wisatawan nusantara

(Sumber: BPS)



TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi



LEMBAR FAKTA SDGs



INDONESIA

INDUSTRI MANUFAKTUR 2016

Laju pertumbuhan industri manufaktur mencapai 4,29% dan sektor ini menyerap 13,24% tenaga kerja



Sektor industri manufaktur menyumbang **21,39%** PDB Indonesia

(Sumber: BPS)

Jumlah pelabuhan penyeberangan Indonesia meningkat dari **175 pelabuhan** (2008) menjadi **210 pelabuhan** (2014)



(Sumber: Kementerian Perhubungan)

Tahun 2014,

93,95%

Jalan Nasional masuk dalam kondisi **mantap**



6,05%

Jalan Nasional masuk dalam kondisi **tidak mantap**



(Sumber: Kementerian PUPR)

PADA TAHUN 2016:



Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam **58,3%**



64,43%

Laki-laki



52,13%

Perempuan

(Sumber: BPS)

Proporsi individu yang mengakses internet **25,37%**



27,2%

Laki-laki



23,52%

Perempuan

(Sumber: BPS)



TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN

Mengurangi kesenjangan
intra- dan antarnegara



LEMBAR FAKTA SDGs



INDONESIA



Koefisien GINI Indonesia
menurun dari 0,41 pada 2015
menjadi 0,39 pada 2016

Koefisien GINI sering digunakan untuk mengukur kesenjangan. Koefisien bervariasi antara 0 (kesetaraan penuh) dan 1 (kesenjangan penuh), yang artinya hanya satu orang yang memiliki kekayaan dan daya beli sementara yang lain dalam kondisi sebaliknya

(Sumber: BPS)



Dalam kurun waktu 2012-2016
terjadi peningkatan persentase
belanja perlindungan sosial
mencapai 11,54%

(Sumber: BPS)



Sebanyak 122 daerah/kabupaten
ditetapkan sebagai **daerah
tertinggal** tahun 2015–2019
oleh pemerintah

(Sumber: Peraturan Presiden, No 131 Tahun 2015)



Pada tahun 2015, rata-rata
persentase penduduk miskin
daerah tertinggal sebesar

18,87%

(Sumber: BPS)



Rata-rata pertumbuhan
ekonomi di daerah tertinggal
pada tahun 2015 sebesar

6,52%

(Sumber: BPS)



TUJUAN 11 KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan



LEMBAR FAKTA SDGs



INDONESIA

Pada tahun 2015, sekitar 87,92% rumah tangga di Indonesia telah menempati rumah layak huni



Perkotaan
97,65%



Perdesaan
92,80%

(Sumber: BPS)



Pada periode tahun 2014-2015, sebanyak 357 kota/kabupaten (61%) telah memenuhi kriteria sebagai kota berskala baik

(Sumber: Statistik KLHK 2015)



Pada periode tahun 2014-2015, sebanyak 58,6 juta ton sampah ditangani dengan pengelolaan sampah yang baik

(Sumber: Statistik KLHK 2015)



Pada tahun 2014, pengguna kendaraan umum (4,69%) jauh lebih kecil dibanding kendaraan bermotor pribadi (40,03%)

(Sumber: Indikator perilaku peduli lingkungan hidup)



4,69%



40,03%



Pada tahun 2013, sebanyak 323 dari 496 Kabupaten/Kota termasuk dalam wilayah dengan tingkat resiko bencana tinggi

(Sumber: RPJMN 2015-2019)





TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan



LEMBAR FAKTA SDGs



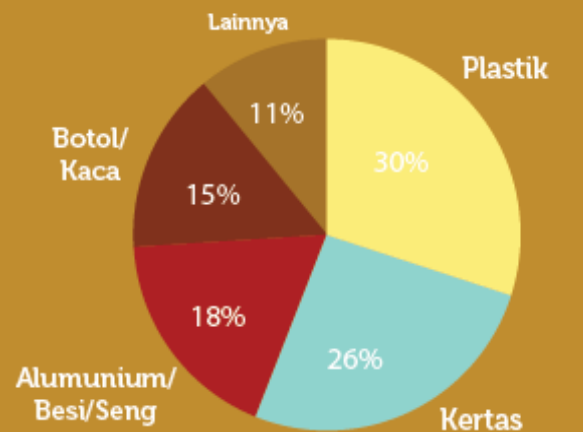
INDONESIA



Pada tahun 2016, hampir 100% limbah B3 dari 1.640 perusahaan (121.655.524,23 ton) telah dikelola

(Sumber: KLHK)

Jenis sampah yang dikelola:



(Sumber: KLHK)



Penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di bank sampah hanya mengurangi 0,014% timbunan sampah

(Sumber: KLHK)



Lima kolaborasi nasional pelaksanaan Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan telah ditetapkan:

1. Ekolabel dan Pengadaan Publik Ramah Lingkungan
2. Bangunan Ramah Lingkungan
3. Industri Ramah Lingkungan
4. Pariwisata Berkelanjutan
5. Fasilitas Publik Ramah Lingkungan

(Sumber: KLHK)



Pada tahun 2015, sebanyak 1.526 perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan regulasi (peringkat Proper: emas 12, hijau 106, biru 1.406)

(Sumber: KLHK)



Pada tahun 2015, sebanyak 2.239 perusahaan telah memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan

(Sumber: ISO Survey 2015)

Indonesia mengeluarkan logo Ekolabel untuk produk ramah lingkungan yang teregistrasi



Ekolabel Tipe I (Produk yang memenuhi SNI kriteria ekolabel) digunakan sebanyak 13 SNI, dan 37 merek dari 4 jenis produk



Ekolabel Tipe II (Produk yang memiliki klaim lingkungan deklarasi yang diverifikasi) digunakan sebanyak 18 nama produk

(Sumber: KLHK)



TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Mengambil tindakan cepat
untuk mengatasi perubahan
iklim dan dampaknya



LEMBAR FAKTA SDGs



INDONESIA

Data dan Informasi Bencana Tahun 2016



109
orang hilang



369
Orang Meninggal



457
Orang Terluka



282.038
Orang Mengungsi



2.139.124
Orang Menderita

(Sumber: Data dan Informasi
Bencana Indonesia)



1,2% rumah tangga
pernah mengikuti
pelatihan simulasi
dan penyelamatan
bencana alam



9,71% rumah tangga
mengetahui
tanda-tanda dan
peringatan untuk
mengatasi kejadian
darurat bencana alam
di tempat tinggalnya

(Sumber: Susenas Modul Hansos 2014)

LIMA BIDANG PRIORITAS DALAM RENCANA AKSI NASIONAL DAN DAERAH UNTUK MENURUNKAN EMISI GRK (GAS RUMAH KACA) DI INDONESIA

(Sesuai Perpres No.61 Tahun 2011)



KEHUTANAN DAN LAHAN
GAMBUS



PERTANIAN



ENERGI DAN TRANSPORTASI



INDUSTRI



LIMBAH

(Sumber: RPJMN 2015 - 2019)



Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
telah disusun oleh 33 dari 34 provinsi

(Sumber: Sekretariat RAN GRK)



TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN

Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan



LEMBAR FAKTA SDGs



INDONESIA



Pada tahun 2016, total produksi penangkapan ikan (6,58 juta ton) masih berada di bawah tangkapan yang diperbolehkan dari estimasi MSY (9,9 juta ton)

(Sumber: KKP)



Indonesia memiliki regulasi untuk memerangi IUU Fishing (UU No. 45/2009 dan Perpres No. 115/2015)

(Sumber: KKP)



Periode tahun 2012-2016, jumlah penerima kredit kecil di sektor perikanan meningkat (2012: 6.644 penerima, 2014: 16.532 penerima, 2016: 48.513 penerima)

(Sumber: KKP)



Indonesia memiliki luas *mangrove* hampir mencapai 3,24 juta ha yang mencakup 243 jenis *mangrove*. Indonesia memiliki biota laut sebanyak 5.319 jenis fauna, 143 jenis flora, 971 jenis alga, dan 406 jenis mikroba

(Sumber: BIG, IBSAP 2015)



Indonesia memiliki ekosistem terumbu karang terluas di dunia yang mencapai 2,5 juta ha sekitar 6,20% dalam kondisi sangat bagus

(Sumber: LIPI)



Pada tahun 2016, 73% pelaku usaha bidang perikanan dan kelautan telah mentaati peraturan yang berlaku

(Sumber: KKP)



Pada tahun 2016 telah ditetapkan 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

(Sumber: KKP)



Pada tahun 2016, telah ditetapkan 165 Kawasan Konservasi Perairan (*Marine Protected Area/MPA*) seluas 17,9 juta hektar

(Sumber: KKP)



TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN

Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati



LEMBAR FAKTA SDGs



INDONESIA



Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan pada tahun 2015 sebesar 95 juta ha (50,6%)

Luas tutupan lahan berhutan pada kawasan hutan:

86,6 juta ha

Luas Tutupan Lahan berhutan pada area penggunaan lain:

8,4 juta ha

Total Luas Daratan:

187,8 juta ha

(Sumber: Statistik KLHK 2015)



Tahun 2016, sebanyak 40 unit kawasan konservasi memperoleh nilai indeks METT (Management Effectiveness Tracking Tool) minimal 70

(Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2016, Dit. KK KLHK)



Pada periode tahun 2011-2015 telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan seluas 2.326.812 Ha

(Sumber: Statistik KLHK 2015)



Kasus peredaran ilegal TSL (Tanaman dan Satwa Liar) yang ditangani sampai dengan P.21:

2015: 43 kasus

2016: 51 kasus

2017 – hingga Mei:
15 kasus

(Sumber: Ditjen Gakum KLHK)

Pada tahun 2015, sebanyak 10 dari 25 jenis satwa terancam punah prioritas meningkat populasinya sebesar 6,54%



Macan Tutul



Badak



Owa



Rusa Bawean



Julang Sumba



Cenderawasih



Tarsius



Monyet Hitam Sulawesi



Kasturi Tengku-Ungu



Celepuk Rinjani

(Sumber: Refleksi Akhir Tahun KLHK 2016)

Pada 2016 telah beroperasi 135 KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), terdiri atas 111 unit KPH Produksi dan 24 unit KPH Lindung dan terbentuk 89 unit KPH Konservasi serta telah beroperasinya 57 unit KPH Konservasi non taman nasional

(Sumber: Laporan Kinerja dan Refleksi KLHK 2016, Laporan Kinerja KSDAE)



TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan



LEMBAR FAKTA SDGs



INDONESIA

Indeks Demokrasi Indonesia pada
tahun **2015** sebesar **72,82**

(Sumber: IDI 2015)



49,14%
Badan Publik melaksanakan
Ketentuan Keterbukaan Informasi
Publik

(Sumber: KIP 2015)

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
pada tahun 2015 sebesar

3,59

(Sumber: SPAK 2015)



Prevalensi anak
laki-laki umur 13-17
yang mengalami
kekerasan dalam
12 bulan terakhir
adalah 38,62%



(Sumber: SKtA 2013)

Prevalensi anak
perempuan umur
13-17 yang
mengalami kekerasan
dalam 12 bulan
terakhir adalah
20,48%

54,98% rumah tangga memiliki anak umur 1-14 tahun yang mengalami hukuman fisik dan atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir

(Sumber: Susenas Modul Hansos 2014)

Pada tahun 2015,
Laporan Keuangan



71% Kementerian/Lembaga,
85% Provinsi,
54% Kabupaten,
dan
65% Kota
mendapatkan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)

(Sumber: BPK)



Pada tahun 2016, terdapat
72,53% anak umur 0-4
tahun dan **81,68%** anak
umur 0-17 tahun yang
memiliki akta kelahiran

(Sumber: Susenas)



Pada tahun 2014,

73,57%
penduduk Indonesia merasa aman
berjalan sendirian di area tempat
tinggalnya

(Sumber: Susenas Modul Hansos 2014)



TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan



LEMBAR FAKTA SDGs



INDONESIA



Remitansi yang diterima Indonesia meningkat dari 6.736 juta USD pada tahun 2011 menjadi 8.860 juta USD pada tahun 2016
(Sumber: BI)



Kontribusi Remitansi tenaga kerja Indonesia terhadap PDB meningkat dari 0,75% pada 2011 menjadi 0,95% pada tahun 2016
(Sumber: BI dan BPS)



Pada tahun 2016, 89,30% konsumen data merasa puas dengan data BPS



Pada tahun 2016, 91,35% pengguna data memanfaatkan data BPS sebagai rujukan utama



Pada tahun 2016 persentase konsumen yang menggunakan data BPS untuk keperluan perencanaan sebesar 11,46% dan mayoritas pengguna data BPS untuk keperluan skripsi/tesis/disertasi sebesar 50,80%

(Sumber: Survei Kebutuhan Data)

Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) pada tahun 2015 sebesar 57 meningkat menjadi 84 pada tahun 2016



Pada periode 2014-2016, jenis program KSST yang paling banyak dilakukan adalah Training
(Sumber: Laporan Tim Komnas KSST)



EKSPOR NON MIGAS sejak tahun 2012 terus turun. Tahun 2016 turun 0,34%. Tanda-tanda pemulihan mulai terlihat di tahun 2017 Januari-Maret 2017 meningkat 21,6% (yoy)
(Sumber: BPS)

Pada tahun 2011-2016, mayoritas pengguna internet berusia 25 tahun ke atas
(Sumber: Susenas)



Terima Kasih

